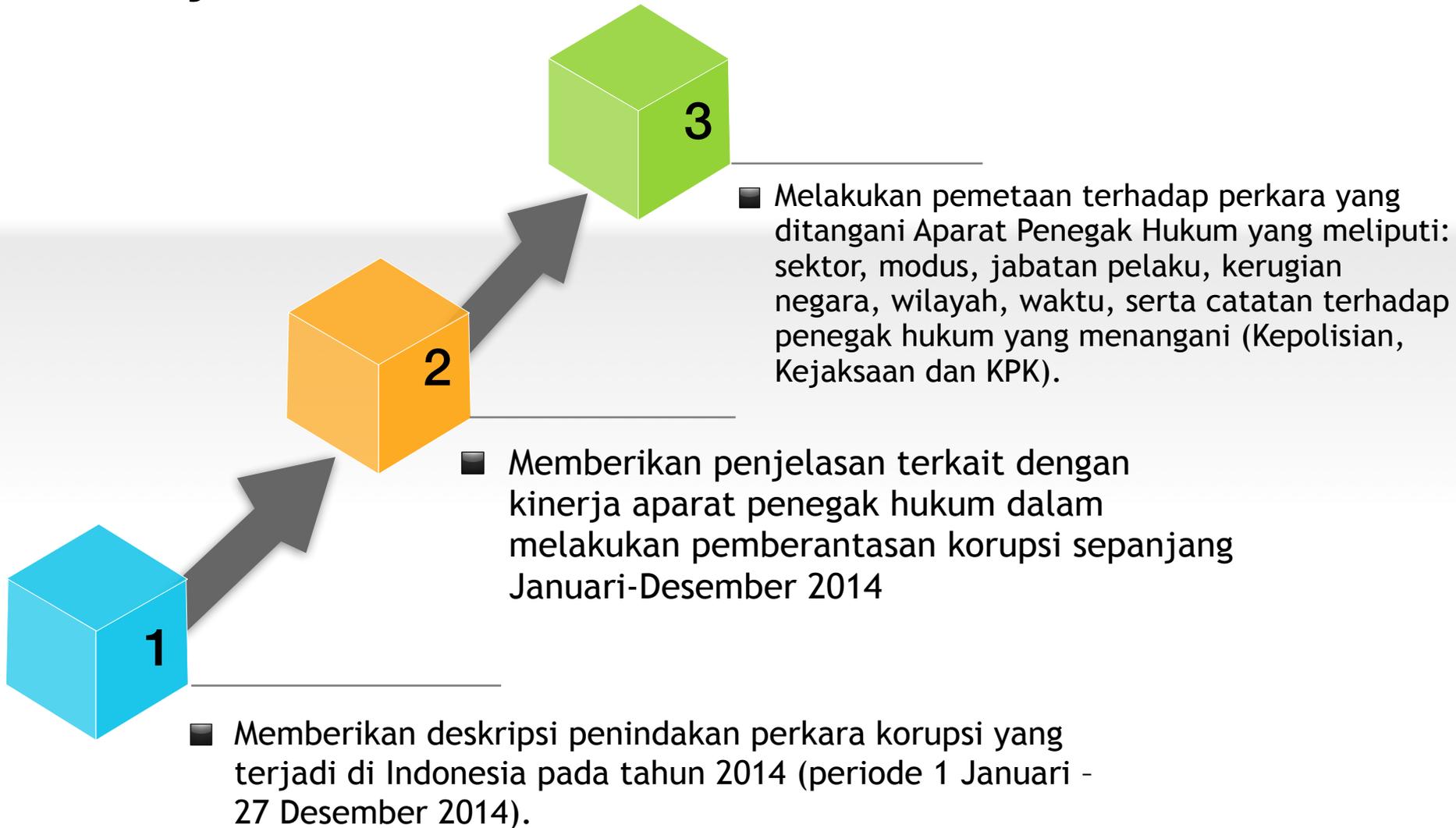




Tren Pemberantasan Korupsi 2014

Divisi Investigasi Dan Publikasi

Tujuan



Metodologi dan Sumber Data

Metodologi

- a) Jenis Penelitian: Kuantitatif
- b) Teknik Pengumpulan Data :
Data sekunder dari berbagai sumber
- c) Teknik Pengolahan Data:
editing, coding, entering, cleaning (Neuman, 2006)
- d) Teknik Analisis Data: SPSS 20 & Microsoft Excel
- e) Mendeskripsikan data-data pada satu variabel menggunakan ukuran modulus (data yang paling sering muncul)

Sumber Data

- a) Website Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)
- b) Permintaan informasi ke Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan KPK)
- c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- d) Media massa online dan cetak
- e) Informasi jaringan ICW di Daerah

Pembatasan dan keterbatasan

Pembatasan

Data yang diambil hanya kasus yang berhasil dipantau dari 1 Januari - 27 Desember 2014, terdiri dari:

- a) Kasus dugaan korupsi pada tahap penyidikan (sudah ada penetapan tersangka)
- b) Penyidikan korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK

Keterbatasan

Keterbatasan:

- a) Minimnya informasi penanganan korupsi dari Aparat Penegak Hukum
- b) Keterbatasan akses/ kelengkapan data dari sumber informasi yang

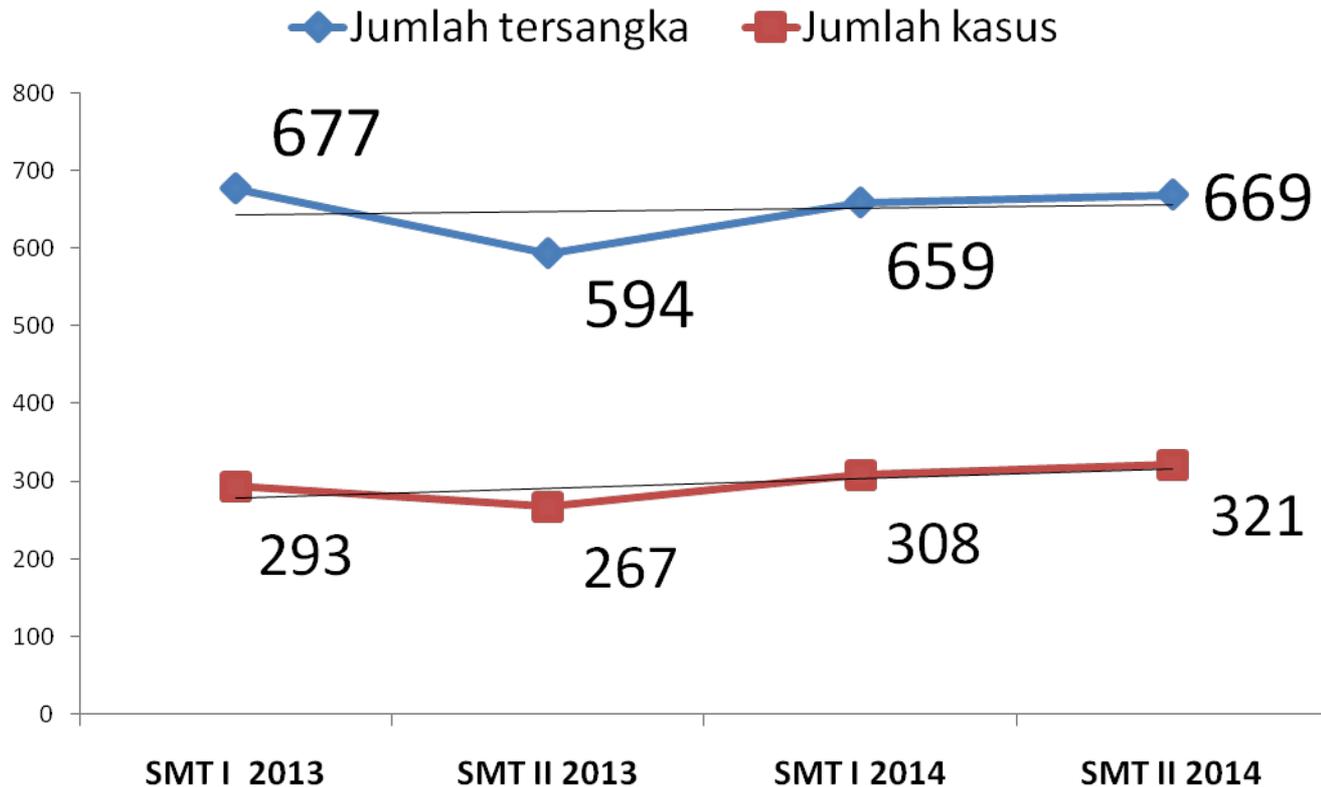
TREN PEMBERANTASAN KORUPSI SEPANJANG TAHUN 2014

	Semester I	Semester II
Jumlah kasus	308 kasus	321 kasus
Jumlah tersangka kerugian negara	659 orang Rp 3,7 triliun	669 orang Rp 1,59 triliun

TOTAL tahun 2014	
Jumlah kasus	629 kasus
Jumlah Tersangka	1328 orang
Kerugian negara	Rp 5,29 triliun

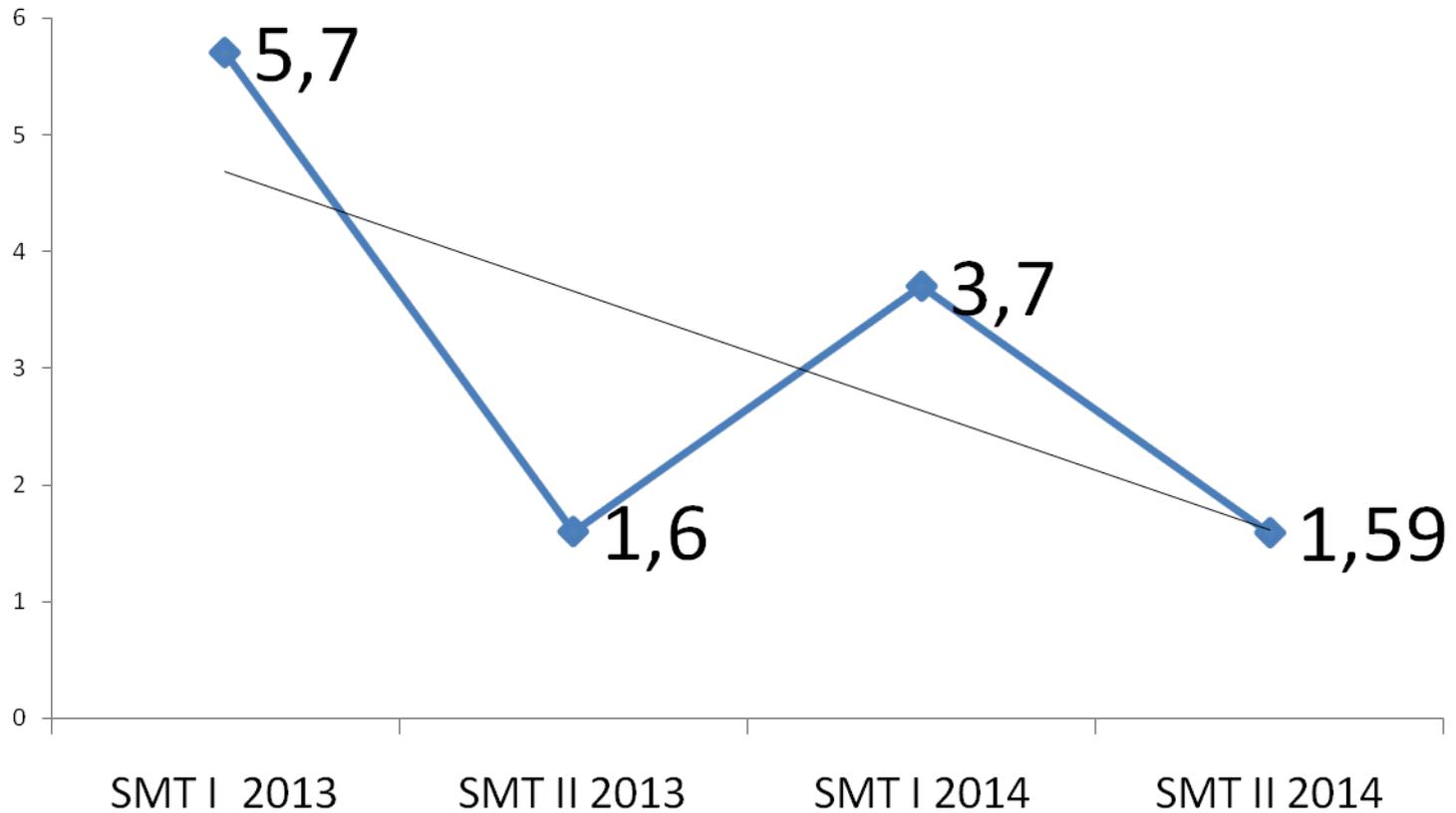
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum pada Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 9 temuan senilai Rp 944,81 miliar. Untuk periode sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun (<http://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2014>). Dilaporkan pada 2 Desember 2014

TRENDLINE JUMLAH TERSANGKA DAN JUMLAH KASUS



- *Trendline* jumlah tersangka dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 2 mengalami penurunan sebanyak 8 tersangka.
- *Trendline* jumlah kasus dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 2 mengalami peningkatan sebanyak 28 kasus.

TRENDLINE KERUGIAN NEGARA (TRILIUN)



* Dalam triliun rupiah

Trendline potensi kerugian negara dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 2 mengalami penurunan. Sebesar Rp 4,11 triliun

PEJABAT TINGGI YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI DI TAHUN 2014



Suryadharma Ali (menteri agama), kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013



Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2009-2014), Tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013, perkiraan kerugian negara Rp 9,9 miliar



Sutan Bhatoeghana (Ketua Komisi VII (energi) DPR 2009-2014 dari fraksi Demokrat), kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan perubahan APBN 2013 di Kementerian ESDM , perkiraan kerugian negara Rp 131,2 miliar

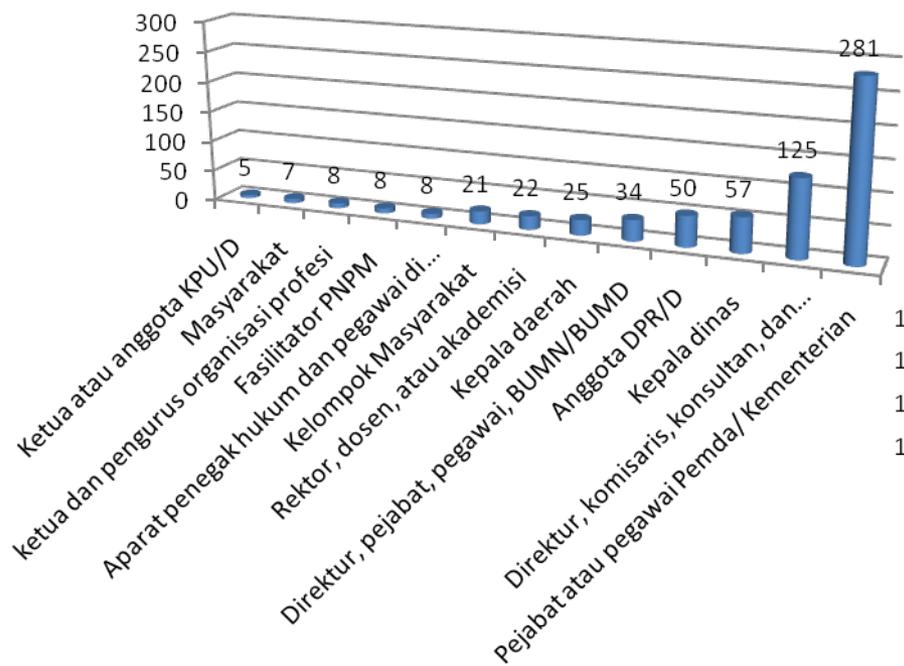


Hadi Purnomo (Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004, Ketua BPK), kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) , perkiraan kerugian negara Rp 375 miliar

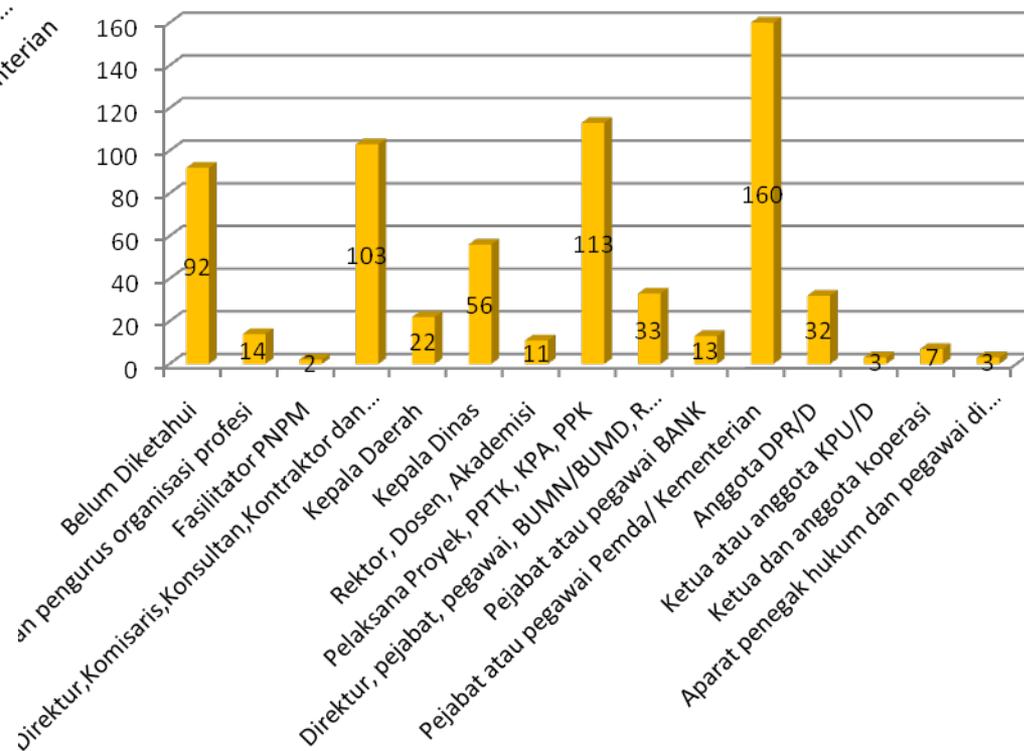
KORUPSI BERDASARKAN JABATAN TERSANGKA

Semester I

I

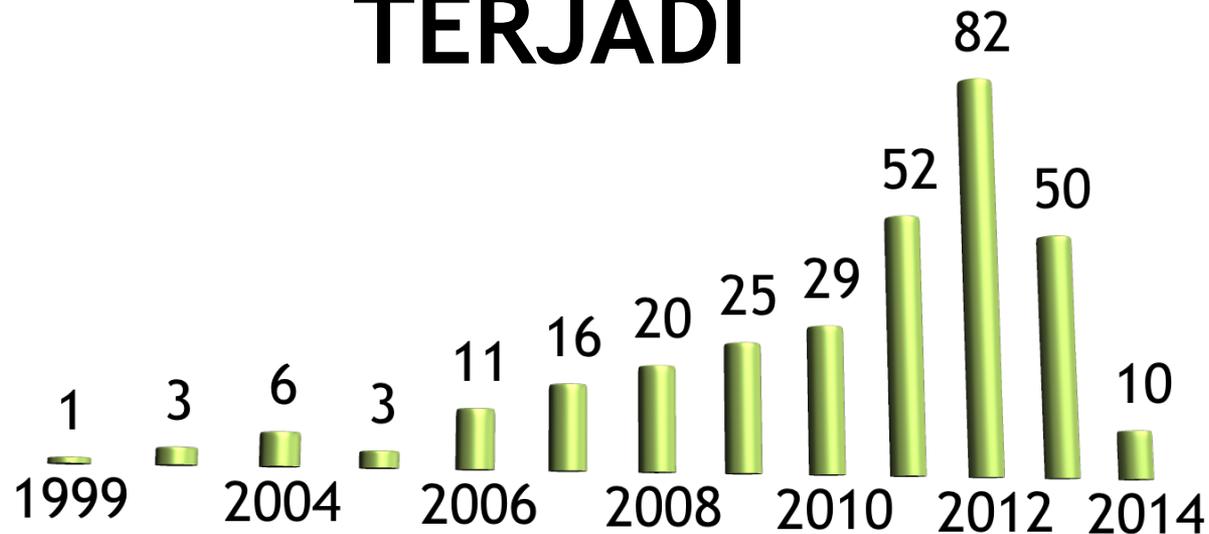


Semester II

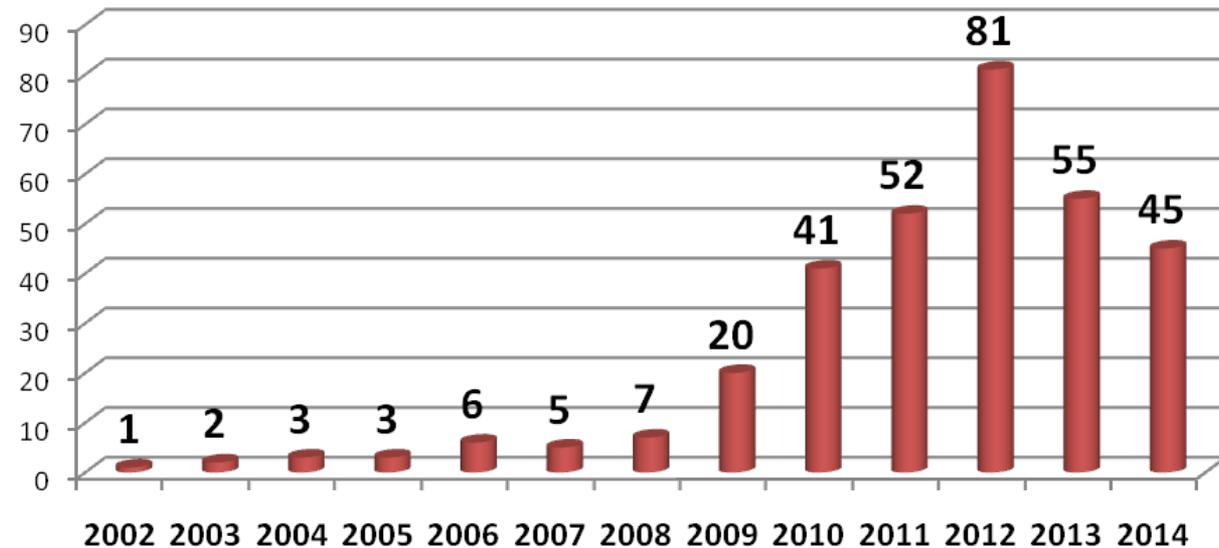


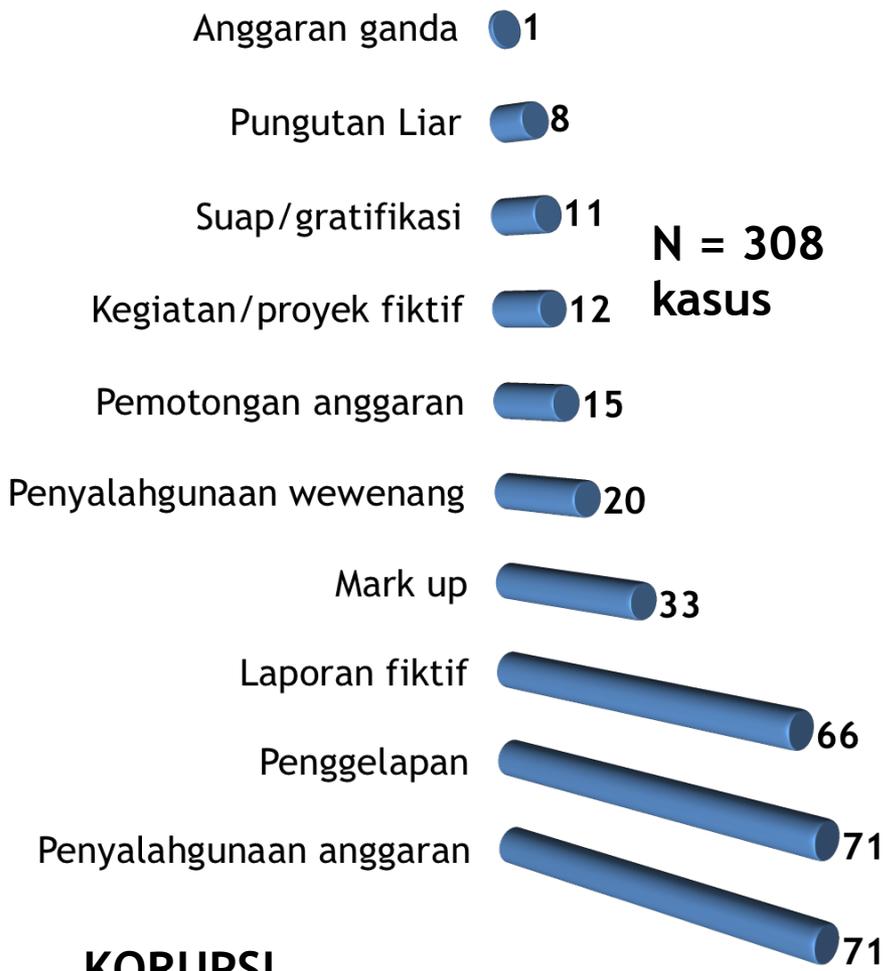
KORUPSI BERDASARKAN TAHUN TERJADI

Semester I

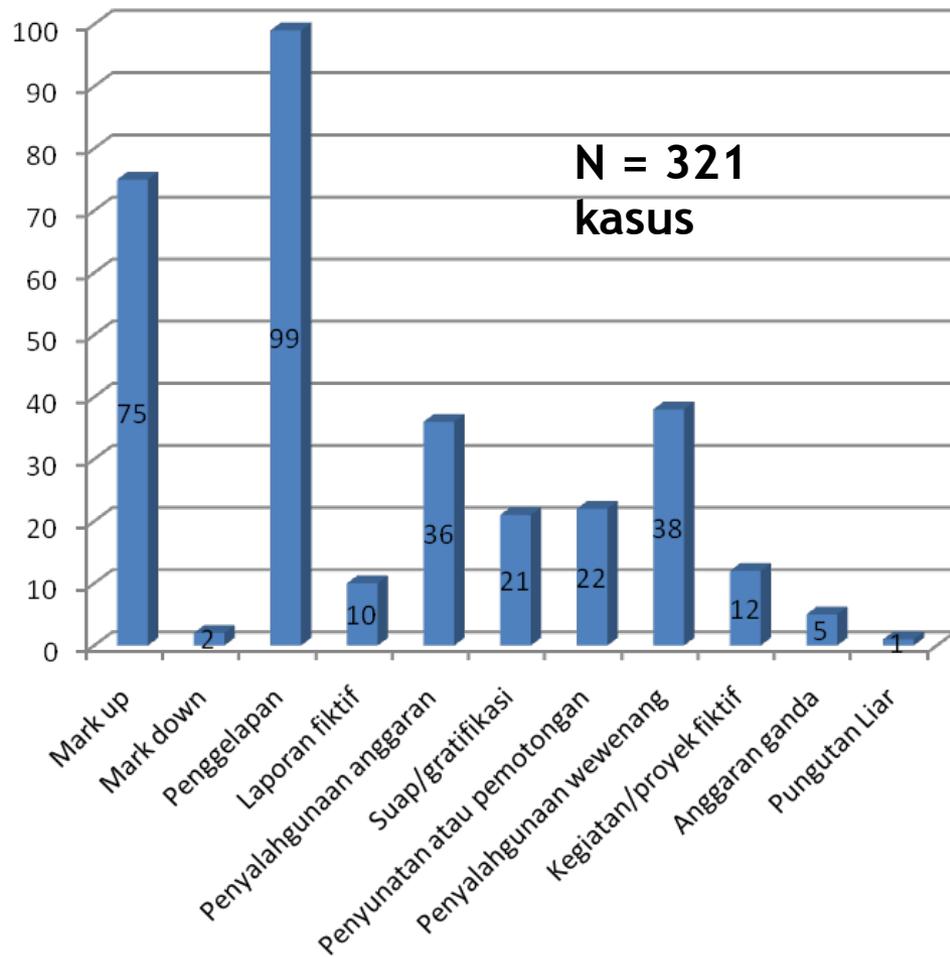


Semester II





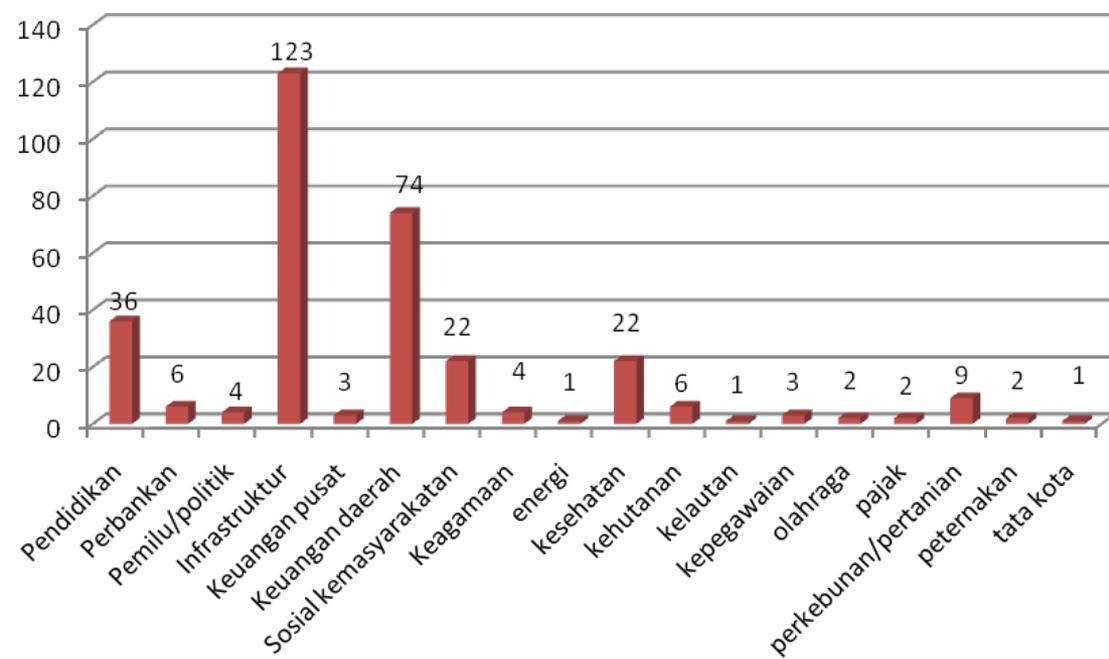
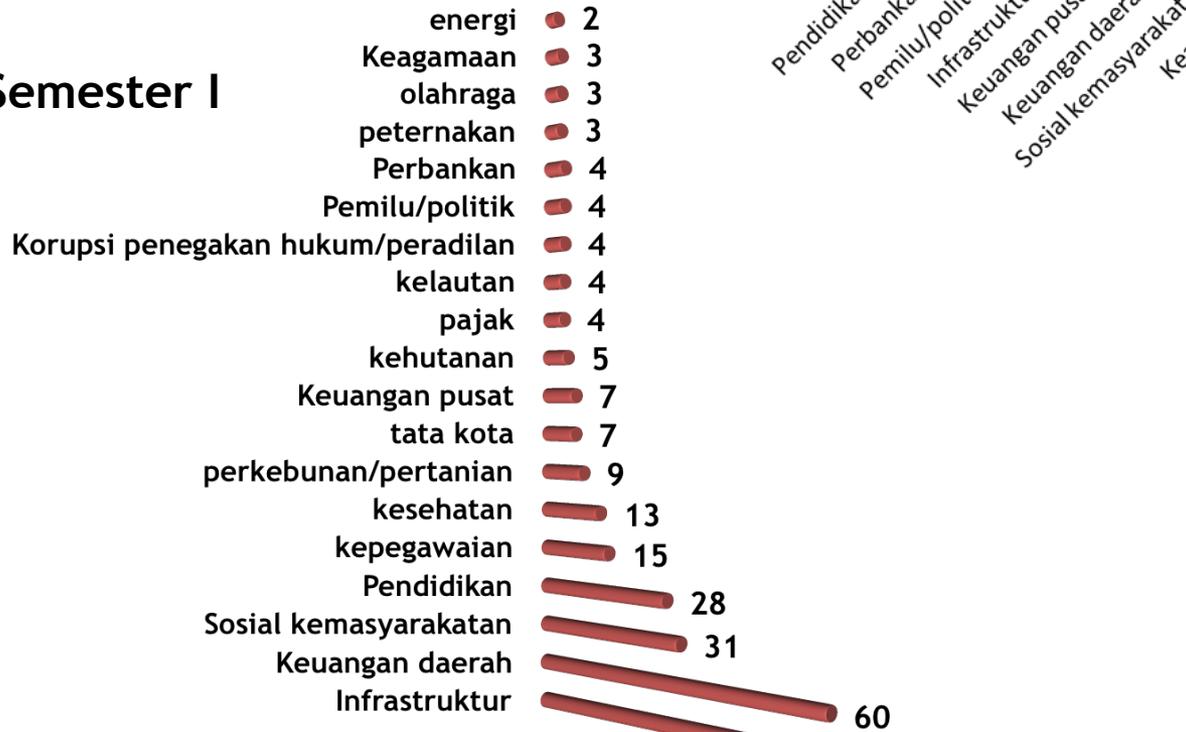
**KORUPSI
BERDASARKAN MODUS
TAHUN 2014 SMT I**



**KORUPSI
BERDASARKAN MODUS
TAHUN 2014 SMT II**

KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR

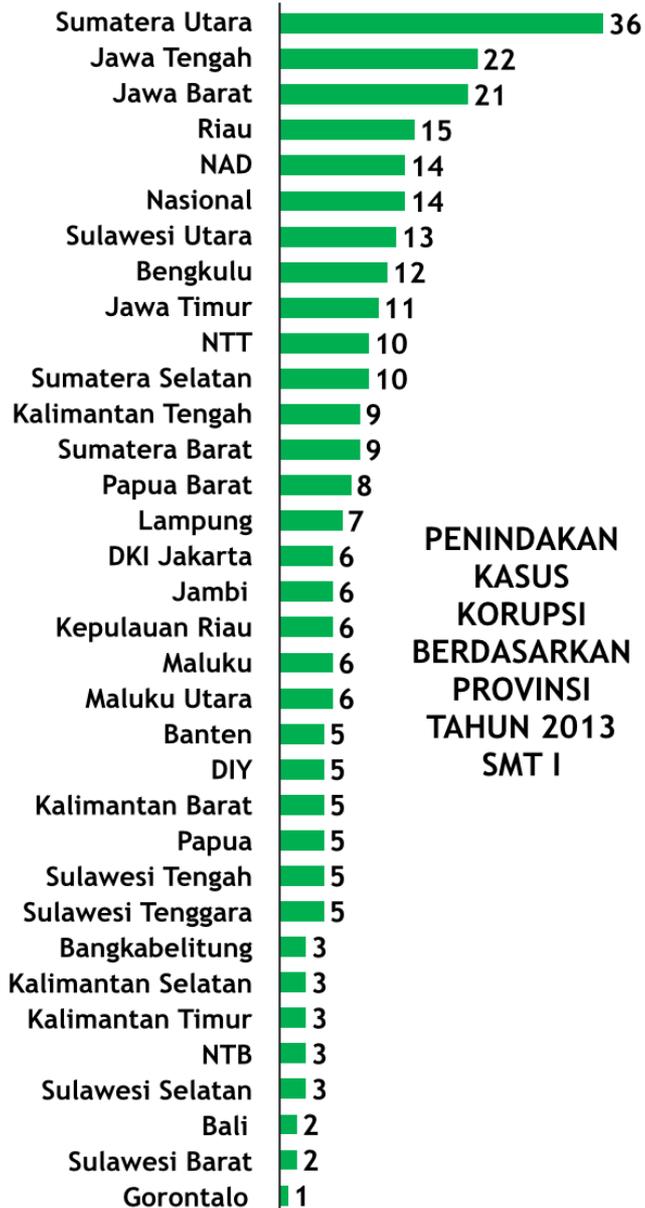
Semester I



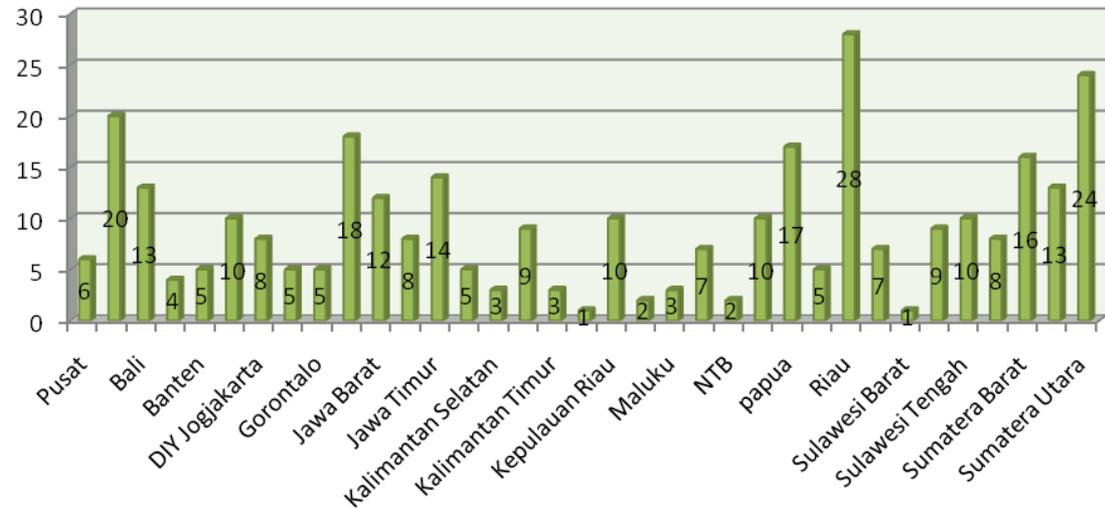
Semester II

- Penanganan perkara korupsi terbanyak pada sektor infrastruktur. Kedua terbanyak pada sektor keuangan daerah.
- Ketiga terbanyak terjadi pergeseran, dari sektor sosial kemasyarakatan (sem 1) ke sektor pendidikan pada (sem II)

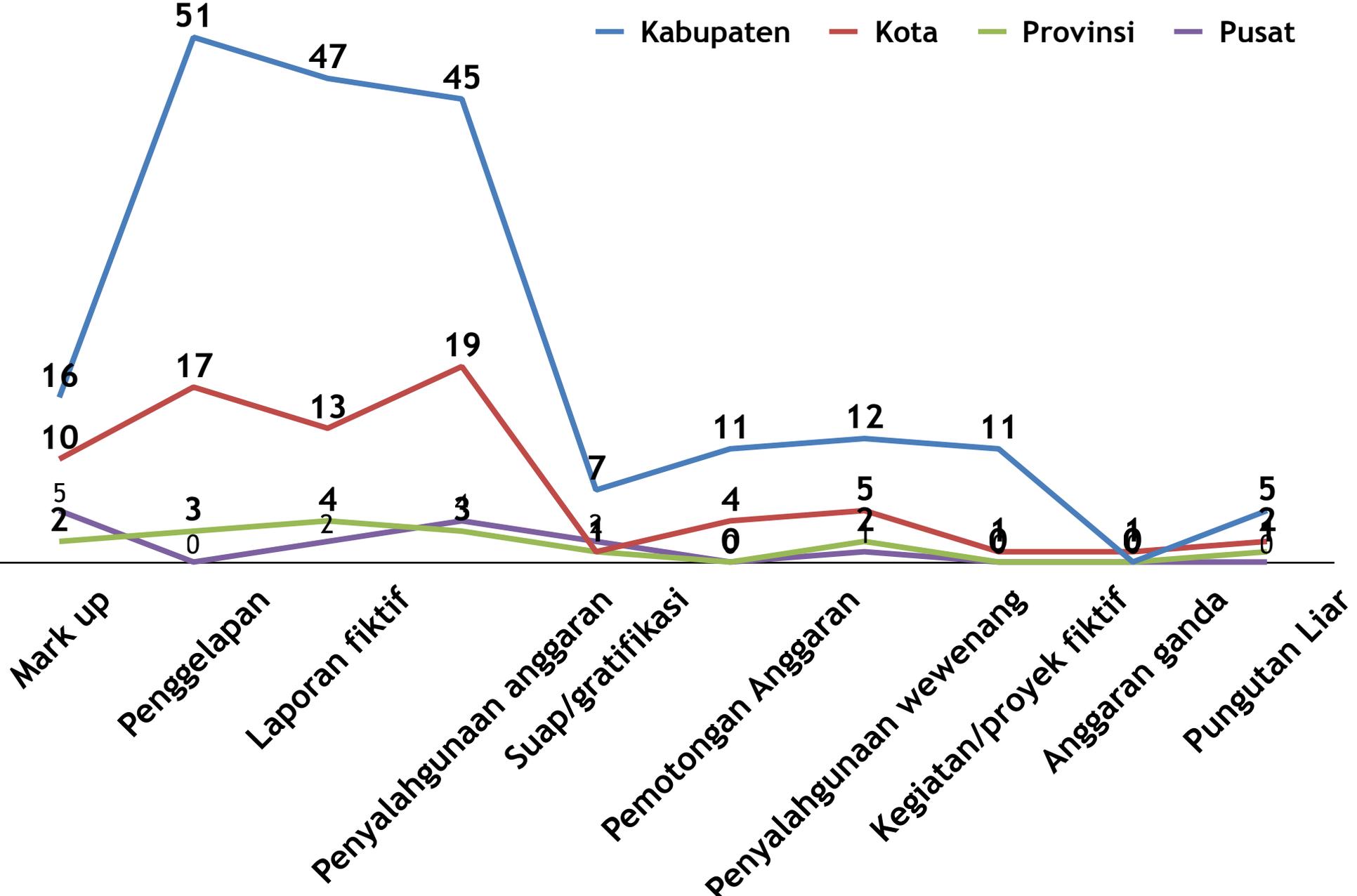
KORUPSI BERDASARKAN PROVINSI



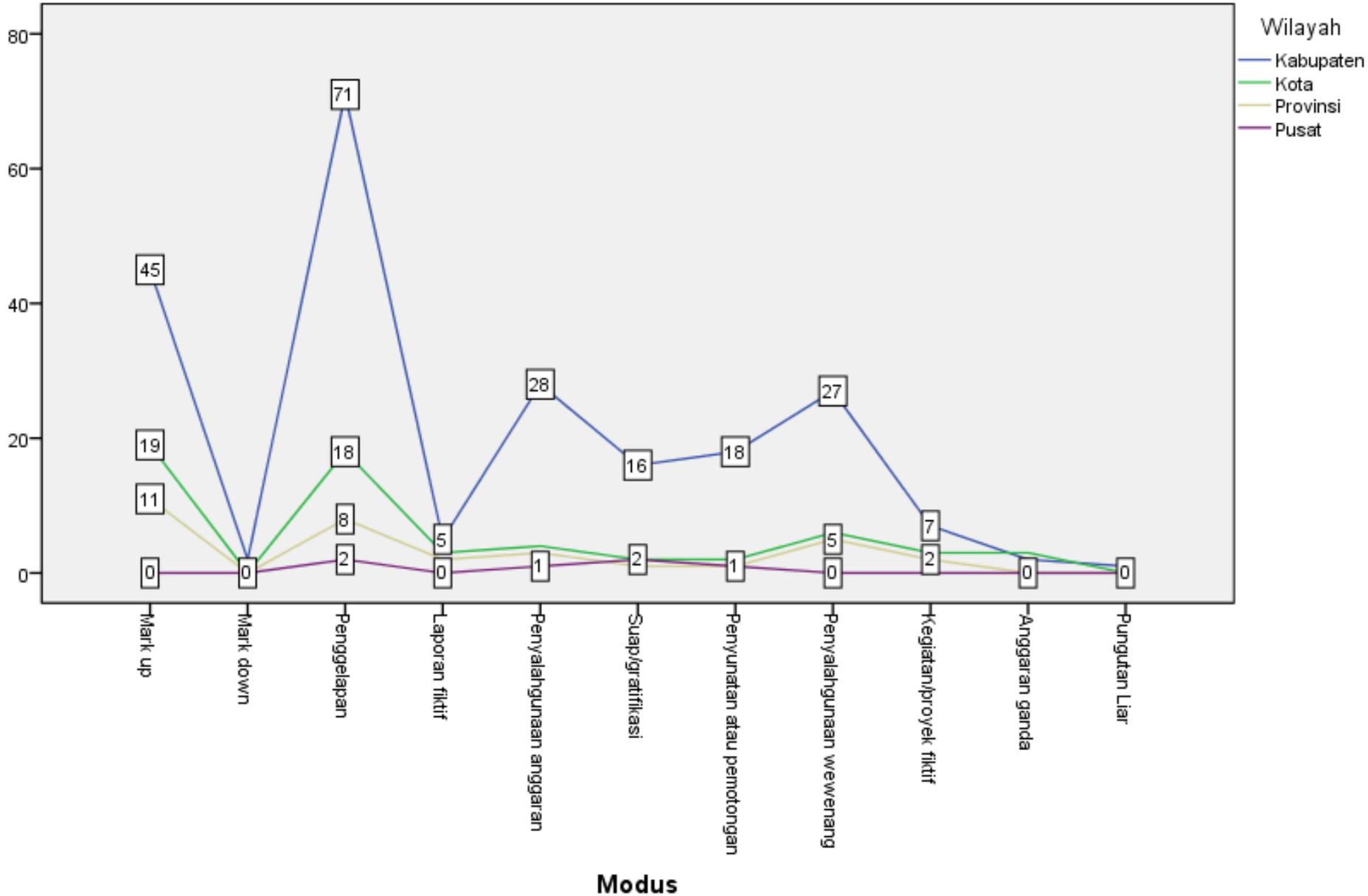
PENINDAKAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2014 SMT II



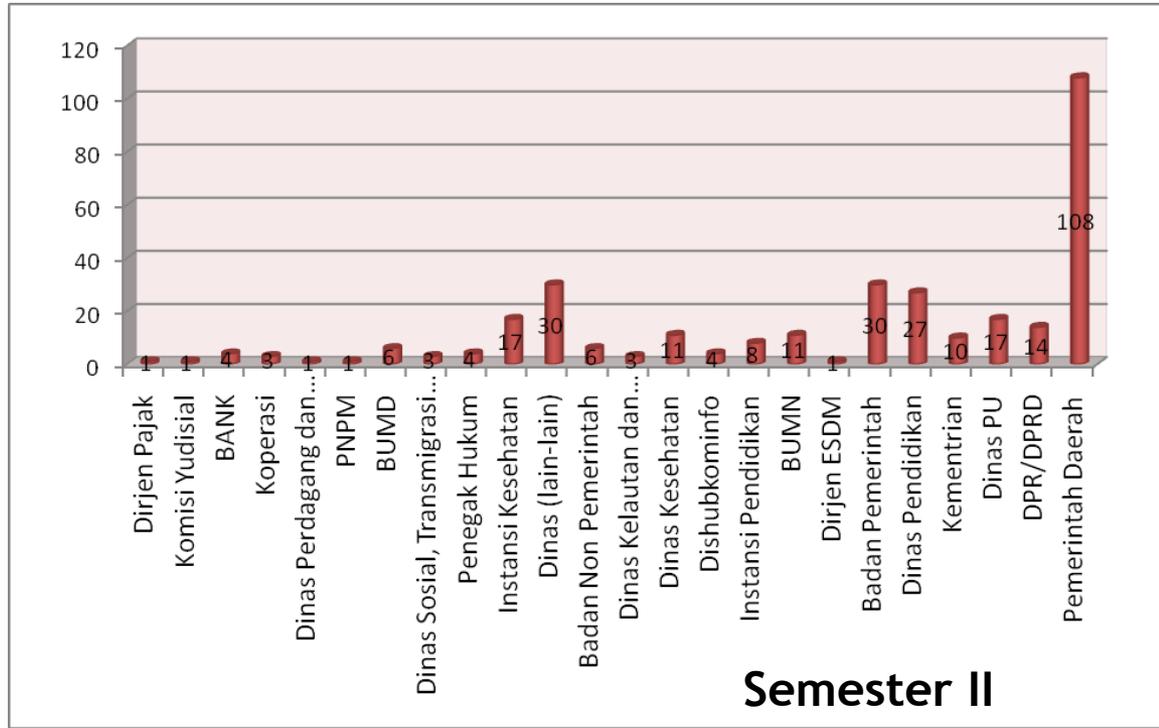
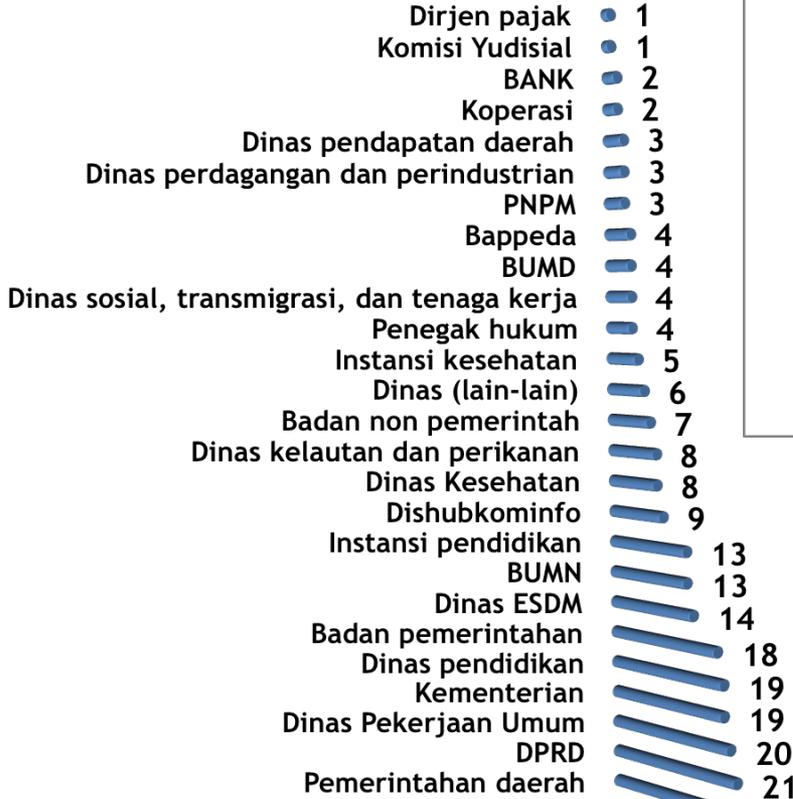
JUMLAH KASUS BERDASARKAN WILAYAH DAN MODUS SEMESTER I TAHUN 2014



JUMLAH KASUS BERDASARKAN WILAYAH DAN MODUS SEMESTER II TAHUN 2014



Semester I

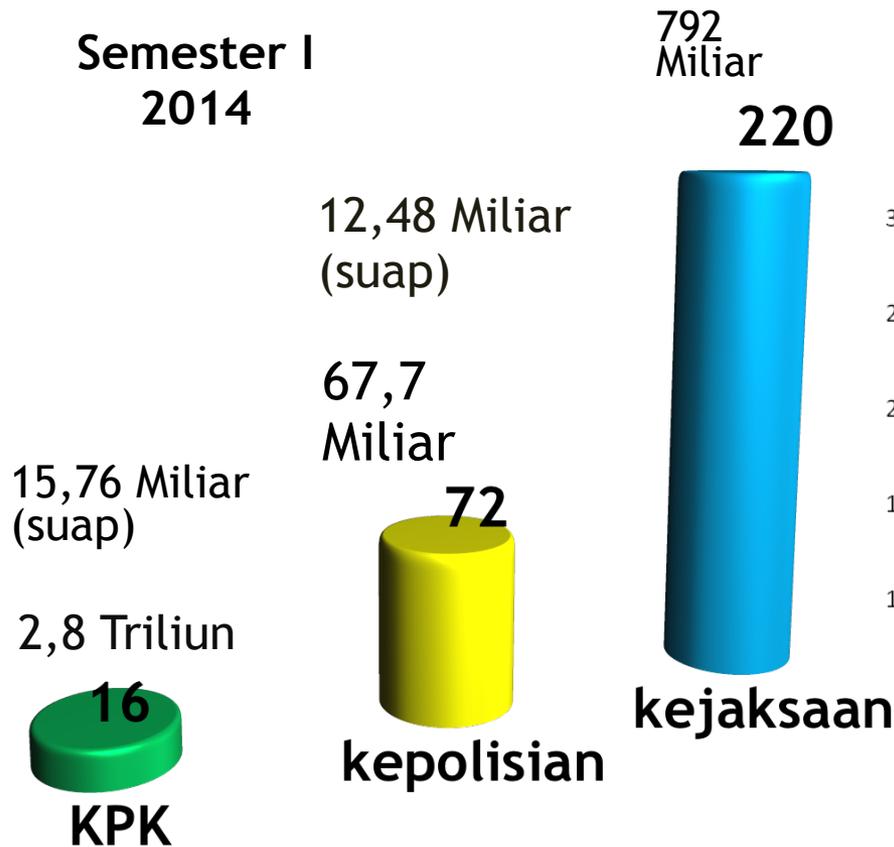


Semester II

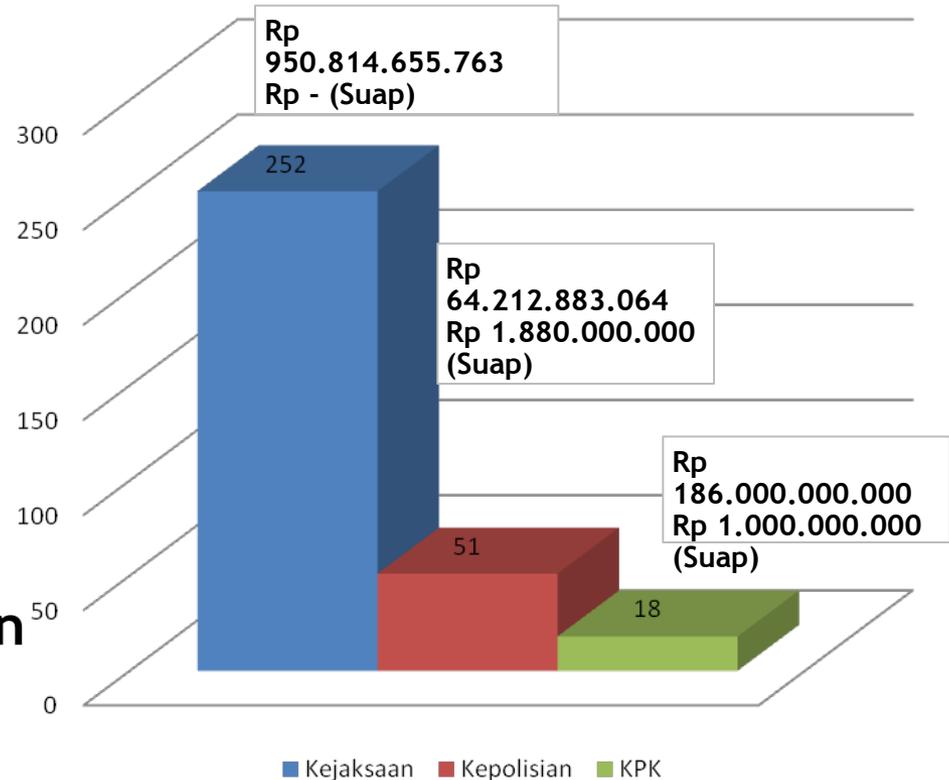
**KORUPSI
BERDASARKAN
INSTANSI**

PERBANDINGAN PENANGANAN PERKARA OLEH PENEKAK HUKUM

Semester I
2014



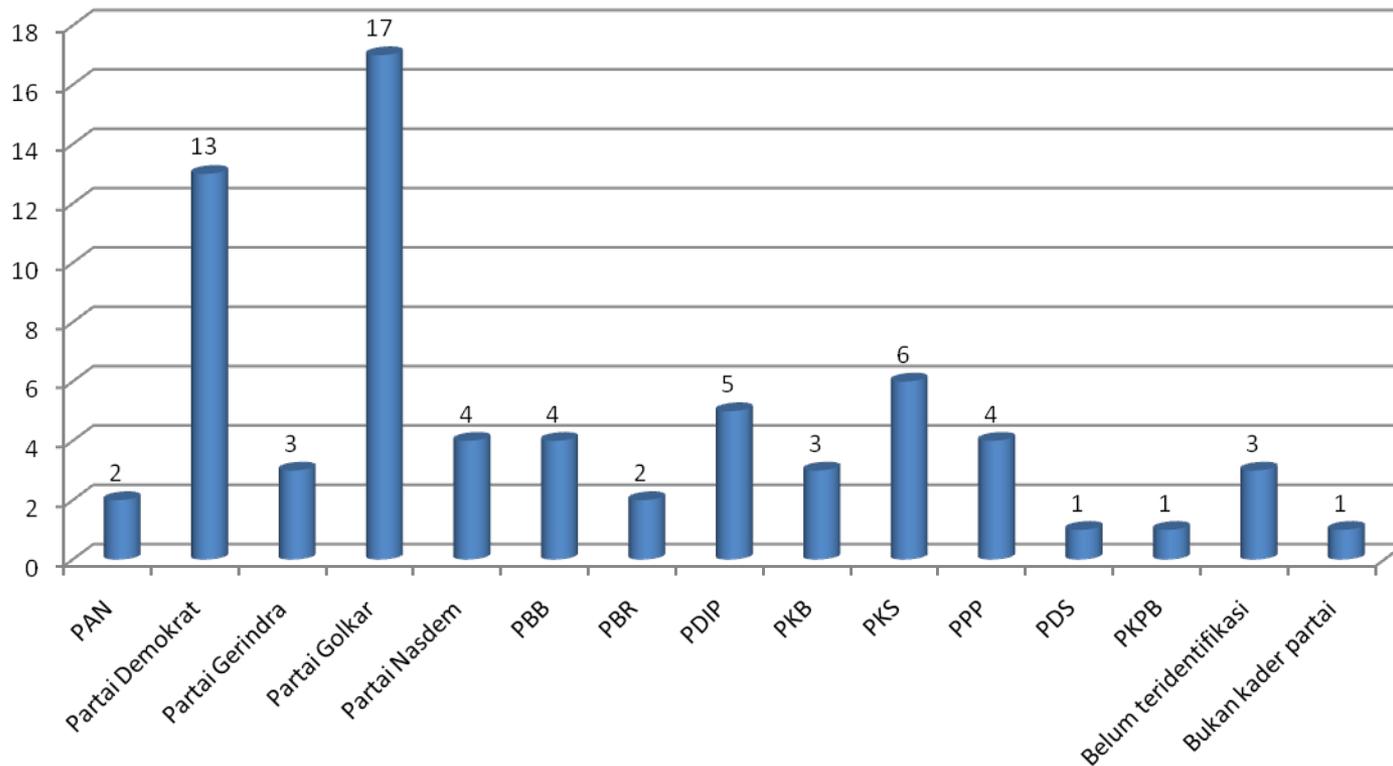
Semester II
2014



- Melibatkan institusi mabes Polri beserta 72 Polda dan Polres
- Melibatkan institusi kejaksaan agung, 220 kejati dan kejari

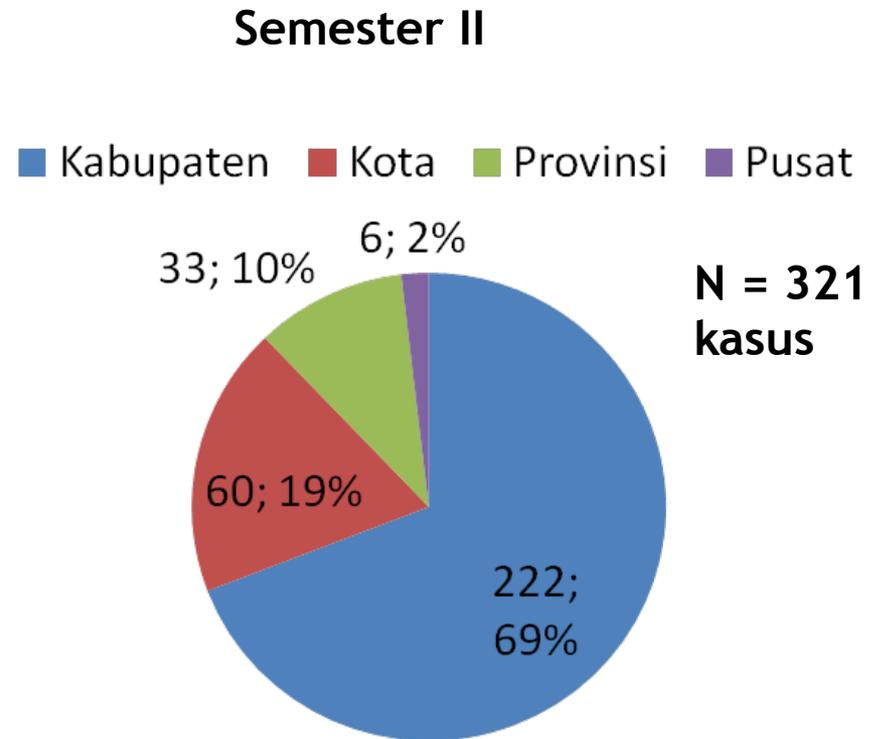
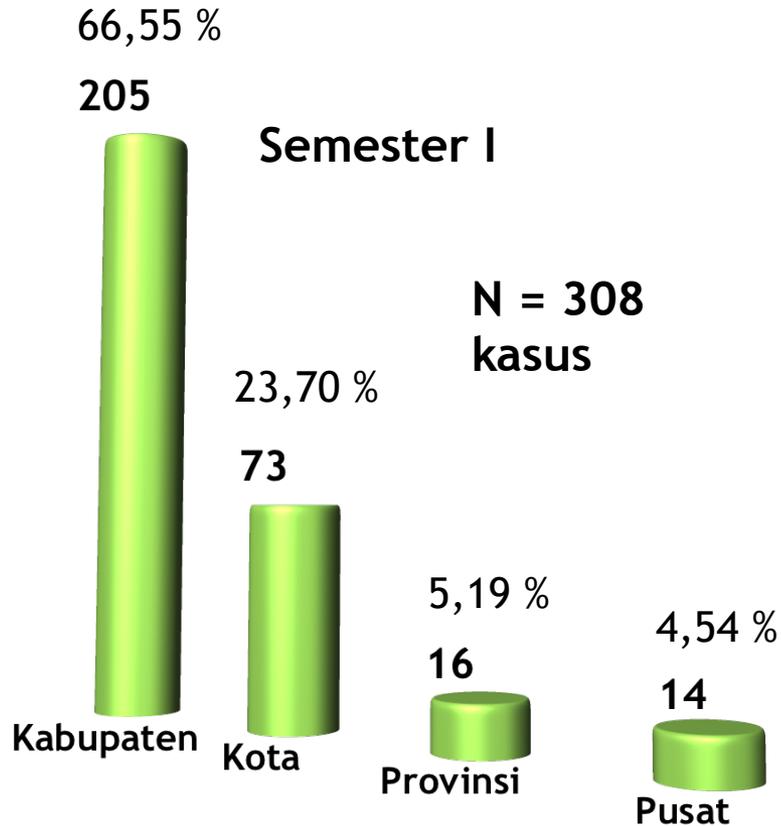
- Melibatkan institusi Mabes Polri beserta 52 Polda dan Polres
- Melibatkan institusi Kejaksaan Agung, 248 kejati dan kejari

KEPALA DAERAH TERSANGKA DAN AFILIASI PARPOL



- Sepanjang 2014, ada 43 Kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi
- Mereka terafiliasi dengan parpol, baik sebagai kader partai tertentu bisa juga diusung oleh koalisi parpol
- Sebanyak 17 kepala daerah tersangka korupsi terafiliasi kepada Golkar (terbanyak) dan 13 kepala daerah terafiliasi kepada Demokrat (terbanyak kedua)

PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH



KESIMPULAN

- Ada peningkatan jumlah kasus dan jumlah tersangka yang diproses oleh aparat penegak hukum pada semester II dibanding semester I tahun 2014
- Ada penurunan signifikan besar potensi kerugian negara yang ditangani oleh aparat penegak hukum antara semester I dibanding semester II (dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 1,59 triliun)
- Kasus korupsi paling banyak yang diproses oleh Aparat Penegak Hukum adalah kasus yang sudah terjadi 2 tahun sebelumnya
- Setidaknya ada 3 orang pejabat tinggi negara yang diproses terkait kasus korupsi sepanjang tahun 2014. Dua diantaranya adalah menteri aktif. Ketiganya diproses oleh KPK
- Hanya ada satu orang anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2014
- 43 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2014. Kebanyakan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi ini terafiliasi kepada Golkar dan Demokrat
- Ada 81 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2014

KESIMPULAN

- Sepanjang tahun 2014, KPK memproses kasus korupsi yang melibatkan aktor yang hampir merata, dari menteri hingga kepala daerah. Sementara Kejaksaan dan kepolisian memproses tersangka yang levelnya menengah ke bawah seperti pejabat di kementerian dan pejabat di pemerintahan daerah, kepala daerah dan rekanan swasta
- Modus korupsi yang terjadi masih sangat konvensional dan sektor yang paling banyak ditarget adalah pengadaan barang/jasa (sektor belanja)
- Sepanjang tahun 2014, penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum didominasi oleh kasus korupsi yang terjadi di daerah, baik provinsi, kabupaten ataupun kota
- Sepanjang tahun 2014 pelaku korupsi terbanyak adalah pejabat atau pegawai pemda/ kementerian. Semester II urutan terbanyak pelaku korupsi adalah pelaksana proyek, PPTK, KPA dan PPK. Semester I urutan terbanyak kedua adalah Direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta. Dua kelompok ini sama-sama garda depan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- Penanganan perkara korupsi di beberapa daerah mengalami peningkatan hingga ke wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan NTT. Provinsi Riau mengalami peningkatan penanganan korupsi yang cukup signifikan

REKOMENDASI

- Kejaksaan dan Kepolisian harus mengembangkan proses penyidikannya sehingga aktor yang diproses tidak hanya menengah ke bawah tetapi juga yang lebih tinggi
- Aparat penegak hukum harus mulai memproses kasus korupsi di sektor penerimaan negara. Karena kerugian negara akibat korupsi di sektor penerimaan negara juga cukup besar
- APH, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian ditingkat pusat perlu mengambil inisiatif untuk menangani perkara korupsi yang terjadi di Pemerintah Pusat.
- Kebijakan desentralisasi memberikan ruang/celah besar bagi terjadinya praktek korupsi. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diarahkan pada penguatan kelompok masyarakat (hak mendapatkan informasi/perlindungan thp kriminalisasi/pelibatan dlm pengambilan keputusan politik-ekonomi) sehingga mekanisme kontrol bisa berjalan secara efektif, ditengah situasi dimana kontrol parlemen dan pengawasan internal justru menjadi bagian dari persoalan korupsi.

Terima kasih

Tim Penyusun :

- Adnan T. Husodo
- Tama S. Langkun
- Lais Abid
- Sigit Wijaya
- Okta Rina Fitri
- Yulisa Frinka
- Wanna Alamsyah